

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA ANAK USIA DINI DI PAUD DAN TK KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG

Wilda Tri Yuliza¹⁾, Febriyanti Nursya²

Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Informasi, Universitas Alifah ^{1,2}
wildatriyuliza@gmail.com¹, Febriyantinnursya9@gmail.com²

Abstract: *Reproductive health education in early childhood is a strategic effort to instill an understanding of the body, self-responsibility, and protection against violence and sexual abuse from an early age. The Indonesian government has emphasized the importance of this education through various policies, including the Ministry of Education Regulation No. 84 of 2008 concerning Guidelines for the Implementation of Reproductive Health Education, as well as character education strengthening programs in early childhood education institutions. However, the implementation of these policies still faces several challenges, particularly in terms of teachers' understanding, institutional readiness, infrastructure support, and cross-sectoral coordination. In Padang City, especially in Lubuk Begalung District, some PAUD and TK institutions have begun introducing reproductive health education, although its implementation remains uneven. This study aimed to analyze the effectiveness of reproductive health education policies for early childhood in PAUD and TK institutions in Lubuk Begalung District, Padang City. The study employed a qualitative approach with a case study design. Informants consisted of principals and teachers from PAUD and TK institutions. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document reviews, and were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. Data validity was ensured through source and technique triangulation.*

Keywords: *Effectiveness, Policy, Reproductive Health Education, Early Childhood.*

Abstrak : Pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini merupakan upaya strategis dalam menanamkan nilai-nilai pemahaman tubuh, tanggung jawab diri, serta perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual sejak dini. Pemerintah Indonesia telah mengatur pentingnya pendidikan ini melalui berbagai kebijakan, seperti Permendikbud No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi, serta program penguatan pendidikan karakter di satuan PAUD. Namun, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek pemahaman guru, kesiapan lembaga, serta dukungan sarana dan koordinasi lintas sektor. Fenomena di Kota Padang, khususnya di Kecamatan Lubuk Begalung, menunjukkan bahwa sebagian PAUD dan TK telah mulai memperkenalkan pendidikan kesehatan reproduksi, namun pelaksanaannya belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini di PAUD dan TK Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan informan terdiri atas kepala PAUD dan TK serta guru. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan Teknik.

Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan, Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Anak Usia Dini.

A. Pendahuluan

Pendidikan kesehatan reproduksi merupakan komponen penting dalam membentuk perilaku hidup sehat dan berkarakter sejak dini. Anak usia dini berada pada masa keemasan (golden age), di mana pembentukan karakter, nilai moral, serta perkembangan fisik, kognitif, dan emosional berkembang sangat pesat. Pada masa ini, pemberian pendidikan yang tepat tentang tubuh, kebersihan diri, serta penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain menjadi pondasi penting untuk mencegah perilaku berisiko di masa depan. Pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga mencakup pengenalan bagian tubuh, perbedaan gender, menjaga kebersihan organ reproduksi, serta pemahaman tentang batasan pribadi dan perlindungan diri dari sentuhan yang tidak pantas (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sejak usia dini tidak terlepas dari meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023, sebanyak 45% kasus kekerasan seksual di Indonesia dialami oleh anak berusia di bawah 12 tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat tahun 2024 menunjukkan terdapat 721 kasus kekerasan pada anak di Sumatera Barat. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sumatera Barat tahun 2023 mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sebagian besar korban berasal dari kelompok usia PAUD dan sekolah dasar. Fakta ini memperlihatkan bahwa anak-anak masih belum memiliki kemampuan yang cukup dalam mengenali dan melindungi diri dari potensi kekerasan atau pelecehan.

Fenomena serupa juga terjadi di Kota Padang, data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang menunjukkan terdapat 89 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024 yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Selanjutnya, pada periode Januari sampai Juli 2024 tercatat sebanyak 42 kasus kekerasan terhadap anak dengan rincian tiga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dua kasus kekerasan fisik, 17 kasus kekerasan psikis, 19 kasus kekerasan seksual, dan satu kasus eksploitasi. Pelaku kekerasan sering kali merupakan orang terdekat anak, seperti anggota keluarga maupun tetangga, yang menunjukkan bahwa lingkungan domestik dan lingkungan sosial sekitar anak memiliki kontribusi besar terhadap risiko terjadinya kekerasan (P2TP2A Kota Padang, 2024; DP3AP2KB Kota Padang, 2024).

Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui pengaktifan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), peningkatan sosialisasi ke sekolah-sekolah, serta pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Namun demikian, sejauh ini belum diketahui secara jelas bagaimana efektivitas pendidikan kesehatan reproduksi yang diterapkan di lembaga PAUD dan TK dalam meningkatkan kemampuan perlindungan diri anak terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji mengingat PAUD dan TK merupakan lingkungan pendidikan formal pertama yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan perilaku anak.

Secara normatif, pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mendukung pendidikan kesehatan reproduksi dan perlindungan anak, di antaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pengembangan aspek moral, sosial-emosional, dan kesehatan anak sejak usia dini. Selain itu, Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD memberikan ruang bagi integrasi pendidikan kesehatan reproduksi melalui tema-tema pembelajaran seperti “Diri Sendiri” dan “Tubuhku”. Akan tetapi, implementasi

kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar lembaga PAUD dan TK belum memiliki kurikulum yang secara eksplisit memuat pendidikan kesehatan reproduksi, sementara guru belum memperoleh pelatihan yang memadai untuk menyampaikan materi secara tepat dan sesuai dengan tahap perkembangan anak (Kementerian PPPA, 2022; Sari & Ningsih, 2021). Selain itu, faktor budaya dan sosial yang masih menganggap pendidikan reproduksi sebagai topik yang tabu turut menjadi hambatan dalam implementasinya (Utami, 2020).

Menurut BKKBN (2020), pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini bertujuan untuk membantu anak mengenal anggota tubuh, membedakan jenis kelamin, menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksi, melindungi diri serta menjaga privasi, dan berani mengungkapkan perasaan apabila mengalami situasi yang tidak nyaman. UNESCO (2018) juga menegaskan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi mencakup aspek biologis, emosional, sosial, dan moral yang membantu anak memahami identitas dirinya dan berinteraksi secara sehat dengan lingkungannya. Penyampaian materi perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak melalui penggunaan bahasa sederhana, media visual, permainan, serta kegiatan bercerita.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan perilaku anak. Rahmawati (2019) menemukan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi mampu meningkatkan pengetahuan anak mengenai tubuh dan kebersihan diri. Wahyuni (2020) menyatakan bahwa peran guru dan orang tua sangat memengaruhi efektivitas pembelajaran reproduksi pada anak. Yuliana (2022) juga melaporkan bahwa metode bermain dan bercerita mampu meningkatkan kemampuan anak dalam mengenali bagian tubuh dan memahami sentuhan aman maupun tidak aman. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek pembelajaran dan pendidikan kesehatan reproduksi secara umum, sedangkan penelitian mengenai efektivitas kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini masih sangat terbatas. Belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran di PAUD dan TK serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik dengan mengacu pada Model Efektivitas Kebijakan Dunn (2018) yang menilai pencapaian tujuan kebijakan melalui indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Selain itu, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan kondisi lingkungan (Nugroho, 2020). Sementara itu, teori perkembangan anak Erikson dan Piaget digunakan untuk memahami kesesuaian pendidikan kesehatan reproduksi dengan tahap perkembangan kognitif dan sosial anak usia dini (UNFPA, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Efektifitas Kebijakan Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Anak Usia Dini di PAUD dan TK Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Diperkuat dengan, Kecamatan Lubuk Begalung merupakan kecamatan yang memiliki kasus kekerasan seksual tertinggi diantara 11 kecamatan yang ada di Kota Padang pada tahun 2024 (DP3AP2KB, 2024).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain studi cross kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pandangan para pelaksana kebijakan di lapangan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini di PAUD dan TK Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 sampai Februari 2026 dilakukan di PAUD dan TK Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala bidang kurikulum, dan guru yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi. Data penelitian bersumber dari wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Anak Usia Dini di PAUD dan TK Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini di PAUD dan TK Kecamatan Lubuk Begalung belum tertuang dalam dokumen khusus, namun telah terintegrasi dalam kebijakan sekolah terkait perlindungan anak dan penguatan karakter. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Kami tidak punya dokumen khusus tentang pendidikan kesehatan reproduksi, tapi itu masuk dalam program perlindungan anak dan pembiasaan hidup bersih.” (Inf-1)

“Secara tertulis belum ada, tapi sudah menjadi kesepakatan bersama dalam rapat kurikulum.” (Inf-2)

“Kalau di kami, kebijakannya lebih ke arah pencegahan kekerasan dan pengenalan tubuh sejak dini.” (Inf-3)

Pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi dilakukan melalui integrasi dalam pembelajaran tematik dengan materi pengenalan anggota tubuh, kebersihan diri, perbedaan jenis kelamin, serta sentuhan aman dan tidak aman. Materi disampaikan sesuai usia anak melalui kegiatan bermain, cerita, dan lagu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Tidak disebut pendidikan reproduksi secara langsung, tapi substansinya ada.” (Inf-4)

“Ada kegiatan mengenal anggota tubuh dan menjaga kebersihan.” (Inf-5)

“Anak-anak belajar sambil bermain, jadi materi kesehatan reproduksi disampaikan lewat cerita, lagu, dan kegiatan bermain.” (Inf-6)

“Pelaksanaannya itu kami masukkan ke dalam tema pembelajaran, seperti tema diri sendiri dan kebersihan. Tidak ada mata pelajaran khusus tentang kesehatan reproduksi.” (Inf-7)

“Yang paling sering itu pengenalan bagian tubuh dan bagaimana menjaga kebersihan diri anak.” (Inf-8)

“Untuk reproduksi, kami lebih banyak mengenalkan batasan tubuh dan sentuhan yang boleh dan tidak boleh.” (Inf-9)

Pelaksanaan kebijakan melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan tenaga

kesehatan. Kepala sekolah berperan dalam pengaturan program, guru sebagai pelaksana pembelajaran, sedangkan orang tua dan puskesmas memberikan dukungan dalam pelaksanaan program.

“Peran kepala sekolah itu lebih ke pengaturan program, kalau guru yang langsung menyampaikan ke anak-anak.” (Inf-1)

“Ada orang tua yang mendukung, tapi ada juga yang masih menganggap ini hal yang sensitif.” (Inf-2)

“Kadang ada dari puskesmas yang datang untuk penyuluhan, tapi tidak rutin.” (Inf-5)

Kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini di PAUD dan TK Kecamatan Lubuk Begalung lebih bersifat kesepakatan internal yang dibangun melalui rapat kurikulum dan kebijakan kepala sekolah yang belum tertuang dalam dokumen khusus. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III dalam Dunn (2018), kondisi ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan disposisi pelaksana telah berjalan dengan baik, namun aspek struktur birokrasi dan kejelasan regulasi masih belum optimal. Komunikasi internal antar pimpinan dan guru telah menciptakan kesepahaman mengenai pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi meskipun belum terdapat pedoman tertulis atau SOP khusus yang mengatur pelaksanaannya.

Pendidikan kesehatan reproduksi tidak diberikan sebagai mata pembelajaran khusus, melainkan diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran. Adanya integrasi materi dalam pembelajaran menunjukkan bahwa implementasi dilakukan secara adaptif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini lebih efektif ketika diintegrasikan dalam pembelajaran tematik dibandingkan diajarkan secara formal seperti mata pelajaran tersendiri. Akan tetapi penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya adanya modul atau panduan terstruktur untuk menjaga konsistensi pelaksanaan.

Pelaksanaan kebijakan melibatkan beberapa pihak, kepala sekolah berperan sebagai pengambil kebijakan internal dan koordinator program, sedangkan guru menjadi pelaksana langsung di kelas. Selain itu, keterlibatan orang tua dan dukungan puskesmas melalui penyuluhan menunjukkan adanya kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini.

Pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Lubuk Begalung dapat dikategorikan sebagai implementasi yang bersifat integratif karena materi pendidikan kesehatan reproduksi tidak berdiri sebagai program tersendiri dan pelaksanaannya lebih didasarkan pada kesepakatan serta komitmen internal sekolah daripada regulasi teknis tertulis yang spesifik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek regulasi teknis melalui penyusunan pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) pendidikan kesehatan reproduksi anak usia dini yang sesuai dengan karakteristik PAUD dan TK.

Efektivitas Kebijakan Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Anak Usia Dini di PAUD dan TK Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dasar anak. Anak mulai mengenal bagian tubuh yang harus dijaga, memahami pentingnya menjaga kebersihan diri, serta mengetahui batasan tubuhnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Anak-anak sekarang sudah tau bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain.” (Inf-4)

“Anak-anak sudah bisa menyebutkan bagian tubuh yang harus dijaga.” (Inf-7)
“Mereka sudah tahu kalau harus cuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh.” (Inf-8)
“Kalau ditanya bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, mereka sudah bisa menjawab.” (Inf-9)

Meskipun demikian, pembentukan perilaku perlindungan diri secara konsisten masih memerlukan penguatan dan pengulangan materi secara berkelanjutan serta dukungan dari orang tua di rumah.

“Kalau tidak sering diulang, anak-anak cepat lupa.” (Inf-1)
“Perlu kerja sama dengan orang tua supaya di rumah juga diterapkan.” (Inf-2)

Anak telah mampu mengenali bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, memahami pentingnya kebersihan diri, dan menyebutkan bagian tubuh yang harus dijaga. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan pada aspek kognitif telah tercapai. Hasil ini sejalan dengan penelitian Handayani dan Wahyuni (2020) yang menemukan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi berbasis permainan meningkatkan pemahaman anak tentang batasan tubuh. Pratiwi dkk. (2023) juga menyatakan bahwa pendidikan seksual usia dini efektif dalam meningkatkan pemahaman anak mengenai bagian tubuh yang harus dijaga serta perlindungan diri.

Meskipun demikian, penguatan berulang dan dukungan orang tua masih sangat dibutuhkan dalam konsistensi perilaku anak. Laporan UNESCO (2018) juga menegaskan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi akan mencapai dampak optimal apabila dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Dunn (2018) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari pencapaian awal, tetapi juga dari keberlanjutan dampaknya. Tanpa sistem monitoring yang terstruktur dan dukungan lingkungan keluarga, efektivitas kebijakan cenderung bersifat parsial.

Efektivitas kebijakan menurut Dunn (2018) merujuk pada sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas yang dicapai pada kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini di PAUD dan TK Kecamatan Lubuk Begalung dapat dikategorikan sebagai efektivitas awal, yaitu kebijakan telah berhasil mencapai outcome pada aspek kognitif anak, namun belum sepenuhnya menghasilkan perubahan perilaku yang konsisten dalam jangka panjang. Peningkatan pemahaman anak mengenai bagian tubuh yang harus dijaga, konsep sentuhan aman dan tidak aman, serta pentingnya menjaga kebersihan diri menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran pada ranah pengetahuan telah tercapai. Akan tetapi masih membutuhkan dukungan orang tua di rumah untuk memperkuat pemahaman yang telah diperoleh di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterlibatan orang tua melalui sosialisasi atau parenting education serta penyediaan pelatihan bagi guru agar mampu menerapkan strategi pembelajaran berbasis pembiasaan dan penguatan karakter secara konsisten.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Kesehatan pada Anak Usia Dini di di PAUD dan TK Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini meliputi komitmen pimpinan sekolah, dukungan kurikulum, keterbukaan guru, dukungan sebagian orang tua, serta kerja sama dengan puskesmas.

“Kami sepakat bahwa anak-anak harus dikenalkan tentang tubuhnya sejak dini sebagai bentuk perlindungan.” (Inf-1)

“Dari sisi kurikulum, kami mendukung penuh karena ini bagian dari pendidikan karakter dan perlindungan anak.” (Inf-4)

“Guru-guru di sini cukup terbuka untuk membahas ini, walaupun tetap hati-hati.” (Inf-6)

“Beberapa orang tua justru meminta sekolah memberikan pemahaman tentang batasan tubuh karena khawatir dengan kasus kekerasan.” (Inf-7)

“Kalau ada penyuluhan dari puskesmas, itu sangat membantu kami.” (Inf-8)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini. Kendala tersebut meliputi keterbatasan kompetensi guru, belum adanya pelatihan khusus, belum adanya pedoman teknis, keterbatasan media pembelajaran, serta masih adanya anggapan tabu dari sebagian orang tua.

“Guru sebenarnya mau, tapi masih ragu menyampaikan karena takut salah dan belum pernah dapat pelatihan khusus.” (Inf-3)

“Masalahnya juga di media pembelajaran, belum banyak media khusus untuk kesehatan reproduksi anak.” (Inf-4)

“Kami belum pernah mendapatkan pelatihan khusus tentang pendidikan kesehatan reproduksi anak usia dini.” (Inf-7)

“Media pembelajaran masih terbatas, jadi kadang kami improvisasi sendiri..... ada juga orang tua yang khawatir kalau anaknya jadi terlalu tahu hal-hal yang belum waktunya.” (Inf-8)

“Beberapa orang tua kurang setuju kalau anaknya dikenalkan soal reproduksi sejak dini.” (Inf-9)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, keterbatasan sumber daya dan masih adanya persepsi negatif dari sebagian orang tua menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini sehingga diperlukan penguatan kapasitas guru, penyediaan media pembelajaran, serta peningkatan pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini.

Faktor pendukung utama dalam penelitian ini adalah komitmen pimpinan sekolah, dukungan kurikulum, serta sikap terbuka guru terhadap pendidikan kesehatan reproduksi. Selain itu, adanya komitmen positif dari pelaksana membuat kebijakan tetap berjalan meskipun tanpa dokumen khusus. Edward III dalam Dunn (2018) menyatakan bahwa disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Dukungan sebagian orang tua serta kerja sama dengan puskesmas juga menjadi faktor penguat. Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Fitriani (2023) yang menyatakan bahwa persepsi positif orang tua meningkatkan keberhasilan implementasi pendidikan kesehatan reproduksi di PAUD.

Faktor penghambat dalam kebijakan ini yaitu adanya keterbatasan kompetensi guru, belum adanya pelatihan khusus, serta keterbatasan media pembelajaran. Menurut Dunn (2018), kemampuan teknis pelaksana sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Ketiadaan pelatihan khusus menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan kesiapan teknis pelaksana.

Faktor penghambat lainnya yaitu anggapan tabu dari sebagian orang tua menunjukkan adanya hambatan sosial budaya. Dunn (2018) menyatakan bahwa dalam kebijakan publik, faktor sosial budaya sering menjadi variabel non-struktural yang memengaruhi penerimaan kebijakan.

Implementasi kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini di PAUD dan TK Kecamatan Lubuk Begalung dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural

seperti belum adanya pedoman teknis atau regulasi tertulis yang secara khusus mengatur pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini, faktor sumber daya manusia seperti keterbatasan pelatihan dan kompetensi guru dalam menyampaikan materi yang sensitif namun tetap sesuai dengan tahap perkembangan anak, dan faktor sosial budaya seperti persepsi sebagian orang tua yang masih menganggap pendidikan kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Penguatan kapasitas guru perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan yang berbasis pada perkembangan anak dan strategi komunikasi yang tepat. Penyusunan pedoman teknis atau SOP juga menjadi langkah penting agar pelaksanaan kebijakan lebih terarah dan terstandarisasi. Selain itu, strategi komunikasi yang adaptif dengan orang tua perlu dikembangkan melalui kegiatan sosialisasi, parenting education, maupun forum diskusi sekolah-orang tua untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia dini di PAUD dan TK Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi telah dilaksanakan melalui integrasi dalam kebijakan perlindungan anak dan pembelajaran tematik di sekolah, meskipun belum memiliki pedoman atau dokumen khusus. Materi yang diberikan mencakup pengenalan anggota tubuh, kebersihan diri, serta pemahaman tentang sentuhan aman dan tidak aman sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran awal anak mengenai perlindungan diri, namun pembentukan perilaku yang konsisten masih memerlukan dukungan dan keterlibatan orang tua. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan didukung oleh komitmen pimpinan sekolah, dukungan kurikulum, kesiapan guru, serta kerja sama dengan orang tua dan puskesmas. Sementara itu, hambatan yang dihadapi meliputi belum adanya pedoman teknis khusus, keterbatasan pelatihan dan media pembelajaran, serta masih adanya anggapan tabu dari sebagian orang tua. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan pihak sekolah perlu menyusun pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) khusus mengenai pendidikan kesehatan reproduksi anak usia dini agar pelaksanaan lebih sistematis dan terstandarisasi. Selain itu pihak sekolah dapat mengajukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mengadakan pelatihan atau workshop bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam menyampaikan materi kesehatan reproduksi secara tepat dan sesuai perkembangan anak. Pihak sekolah juga disarankan untuk dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan kesehatan reproduksi di rumah.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. (2024). *Provinsi Sumatera Barat dalam angka 2024*. Padang: Badan Pusat Statistik.
- BKKBN. (2020). *Modul 8: Kesehatan Reproduksi Anak Usia Dini*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sumatera Barat. (2023). *Laporan kinerja dan program perlindungan anak Provinsi Sumatera Barat tahun 2023*. Padang: DP3A Provinsi Sumatera Barat.
- DP3AP2KB. *Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan tahun 2024*.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.

- Handayani, R., & Wahyuni, S. (2020). Pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan perlindungan diri pada anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 14(2), 123–132.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja di Fasilitas Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian PPPA. (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia 2022*. Jakarta: Kemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- KPAI. (2023). *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2023*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- L Arliman, E Ratnawati, JSP Sihombing, VR Multiwijaya, AA Razak, *Consumer Protection Against Flight Delays Resulting from Airline Operational Failures to Provide Information Services as Part of Human Rights*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 19. No. 1, 15-32.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang. (2024). *Laporan kegiatan P2TP2A Kota Padang tahun 2024*. Padang: Pemerintah Kota Padang.
- Sari, D., & Ningsih, R. (2021). Pemahaman Guru PAUD terhadap Pendidikan Kesehatan Reproduksi Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi*, 5(3), 234–245.
- UNESCO. (2018). *International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach*. Paris: UNESCO.
- UNFPA. (2020). *Comprehensive Sexuality Education: Advancing Human Rights and Health*. New York: United Nations Population Fund.